

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perlombaan teknologi pada Perang Dingin telah mengubah banyak aspek keamanan nasional bagi negara bangsa, salah satunya dalam kapabilitas persenjataan. Setelah berakhirnya Perang Dingin, nuklir terus menjadi unsur kekuatan yang dibangun oleh negara-negara besar di dunia untuk mempertahankan keamanan negaranya. Disisi lain, senjata nuklir adalah salah satu indikator yang menentukan posisi sebuah negara dalam arena internasional. Senjata nuklir dapat meningkatkan *bargaining position* negara tersebut, sehingga menjadi unsur prestis bagi politik negara pemiliknya.

Saat ini, Tiongkok tengah menjadi negara maju yang diprediksi akan menggantikan posisi Amerika Serikat sebagai kekuatan dunia. *Status quo* Tiongkok mendorong perkembangan ekonomi dan teknologi yang pesat, memaksanya untuk terus berinovasi agar dapat menyamakan kedudukan dengan negara maju lainnya yang sudah mapan. Tiongkok adalah salah satu negara yang didukung dengan senjata nuklir atau *Nuclear Weapon States* (NWS) yang merupakan anggota NWS kelima setelah Amerika Serikat, Rusia, Britania Raya, dan Perancis. Kepastian informasi terkait senjata nuklir Tiongkok masih sulit untuk ditelusuri karena pemerintah dan angkatan bersenjata yang merahasiakan data lengkap keamanan pertahanan mereka. Diperkirakan, hulu ledak Tiongkok tersebar di 12 gudang senjata dan sebagian besar berpusat di pusat penyimpanan senjata yang disebut Pangkalan 22, di Provinsi Shaanxi, Tiongkok Tengah (Kristensen & Norris, 2017).

Senjata nuklir pertama kali diuji coba oleh pemerintah Tiongkok pada 16 Oktober 1964. Pada saat yang sama, pemerintah Tiongkok juga mendeklarasikan diri bahwa negaranya tidak akan menjadi pihak yang pertama menggunakan senjata nuklir untuk menyerang lawan secara tanpa kecuali dan di bawah kondisi apapun (*unconditional*) atau disebut *No First Use policy* atau *No First Use pledge*. Tiongkok juga berjanji untuk tidak menggunakan atau mengancam penggunaan

senjata nuklir kepada negara non-senjata nuklir atau *nuclear-weapon-free zones* (NWFZs) pada kondisi apapun.

Pernyataan tersebut merupakan cerminan dari keengganan Mao Zedong, presiden Republik Rakyat Tiongkok kala itu, untuk ikut serta dalam konstelasi perlombaan senjata nuklir karena alasan strategis (Talmadge, 2019). Pemerintah Tiongkok saat itu tidak menjadikan senjata nuklir sebagai prioritas nasionalnya karena fokus pembangunan saat itu adalah di bidang ekonomi dan politik. Dalam urusan pertahanan, Mao beranggapan bahwa tujuan senjata nuklir untuk dua hal, yaitu bentuk pertahanan diri untuk mencegah agresi militer lawan politik (*deterrence*) dan sebagai perlawanan terhadap ancaman nuklir yang dilakukan oleh negara bersenjata nuklir agar mereka tidak memberikan tekanan terhadap negara non-senjata nuklir. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diartikan bahwa Tiongkok mepersepsikan senjata nuklir sebagai bagian dari upaya pelengkap pertahanan keamanan nasionalnya, bukan sebagai alat politik luar negeri.

Apabila melihat sejarah perkembangannya, pemimpin Tiongkok terlihat memiliki pandangan tersendiri terhadap senjata nuklir. Ketika berhasil meluncurkan uji coba persenjataan nuklirnya pertama kali, pemerintah Tiongkok langsung merilis pernyataan resmi mengenai sikap dan pandangan negaranya terhadap senjata nuklir yang mereka miliki dan isu perlombaan senjata nuklir yang saat itu terjadi. Dalam dokumen tersebut dijelaskan bahwa motif pengembangan senjata nuklir adalah karena adanya tekanan akibat persaingan politik internasional, yang didorong terutama oleh Amerika Serikat, sehingga memaksa pemerintah Tiongkok untuk membangun senjata nuklir sebagai pertahanan keamanan nasional. Tujuan pembangunan senjata nuklir Tiongkok adalah untuk mencegah monopoli senjata nuklir Amerika Serikat serta untuk menciptakan perdamaian (Statement of the Government of the People's Republic of China, 1964). Selanjutnya, pemerintah Tiongkok juga menyatakan pihaknya telah menganjurkan pelarangan total dan penghancuran senjata nuklir yang menyeluruh namun ditentang oleh Amerika Serikat.

Sistem politik komunis yang dijalankan Tiongkok membuat pemimpin negara menjadi aktor sentral dalam kebijakan senjata nuklir. Dinamika pada kebijakan nuklir adalah hasil pertimbangan persepsi dan pemahaman yang dianut para pemimpin Tiongkok (Weidi, 2016; Jishe, 2020). Mao Zedong adalah tokoh yang berpengaruh pada perkembangan awal kebijakan senjata nuklir. Mao adalah tokoh yang menginisiasi prinsip *No First Use* pada senjata nuklir Tiongkok. Persepsi Mao terhadap nuklir ini didasari oleh pandangannya mengenai pentingnya kebijaksanaan dalam mengendalikan senjata. Mao mengatakan bahwa senjata nuklir hanyalah macan kertas (*paper tiger*) yang berguna hanya untuk menakuti dan menggertak lawan, bukan untuk memenangkan perang. Menurutnya, relasi antara pemahaman manusia terhadap politik, strategi perang, dan persenjataan adalah penentu kemenangan. Selain itu, ia juga sadar terhadap konsekuensi dan biaya yang akan ditanggung oleh negaranya apabila menjatuhkan nuklir secara ringan. Atas pertimbangan tersebut, ia berjanji pihaknya tidak akan meluncurkan serangan nuklir terlebih dahulu karena hal tersebut sama dengan tindakan kriminalitas bagi kemanusiaan. Meskipun demikian, mempersiapkan senjata nuklir adalah keharusan bagi pertahanan Tiongkok mengingat ancaman nuklir yang nyata dari lawan.

Gagasan Mao tersebut kemudian menjadi permulaan lahirnya konsep *No First Use*. *No First Use* merupakan pernyataan dari sebuah negara bersenjata nuklir untuk tidak menjadi pihak yang pertama kali meluncurkan serangan nuklir kepada lawan. Konsep ini sebenarnya sempat menjadi perhatian bagi Amerika Serikat pada pemerintahan presiden Harry Truman di tahun 1948 yang berencana untuk membangun pertahanan nuklir tanpa menggunakannya untuk perang (Feiveson & Hogendorn, 2003). Namun, wacana tersebut dibatalkan karena dianggap dapat membuat Amerika Serikat diremehkan oleh Uni Soviet dan menurunkan kredibilitas Amerika Serikat dimata sekutunya.

Pada dasarnya tidak ada aturan internasional mengenai bagaimana kebijakan senjata nuklir pada NWS, apakah cakupan dari tujuan senjata nuklir tersebut seharusnya dibatasi atau tidak. *No First Use* tidak memiliki konsep yang baku pada implementasinya karena ia merupakan prinsip yang dinyatakan secara sukarela oleh negara untuk mendasari kebijakan nuklirnya. Oleh karena itu, terdapat perbedaan mengenai implementasi prinsip *No First Use* diberbagai anggota NWS. Perbedaan

tersebut didasarkan pada kepentingan dan persepsi tiap negara terhadap potensi ancaman eksternalnya. Sehingga, dapat dikatakan bahwa tidak ada kewajiban bagi anggota NWS manapun untuk mengadopsi prinsip *No First Use*. Meskipun demikian, keberadaan *No First Use* penting bagi negara bersenjata nuklir karena dapat menjadi pedoman yang membatasi pengembangan dan penggunaan senjata nuklir bagi negara yang memilikinya. Maka, kesediaan negara untuk mengadopsi *No First Use* merupakan cerminan bahwa negara tersebut mendukung perlucutan senjata nuklir (*nuclear disarmament*) yang bertujuan untuk mengurangi bahaya ancaman dan dampak nuklir.

Tiongkok adalah anggota NWS pertama yang secara tegas menyatakan pihaknya tidak akan menggunakan senjata nuklir untuk memulai invasi terhadap lawan dan kebijakan ini berlaku dalam kondisi apapun tanpa terkecuali. Pernyataan seperti ini disebut sebagai *unconditional No First Use*. Selanjutnya, pada 1982, Uni Soviet secara resmi mendeklarasikan bahwa negaranya menerapkan prinsip *No First Use* terhadap senjata nuklirnya namun dengan pertimbangan apakah kekuatan lain akan mengikutinya atau tidak (Blackaby, Goldblat, & Lodgaard, 1984). Namun, setelah Uni Soviet bubar, Rusia menghapus prinsip *No First Use*-nya. Anggota NWS lainnya yang selanjutnya ikut menerapkan *No First Use* adalah India pada 1999.

Keseriusan komitmen Tiongkok terhadap *No First Use*-nya berlanjut hingga pemerintahan pemimpin tertinggi berikutnya, Deng Xiaoping. Deng adalah salah satu pemimpin yang berperan penting bagi perkembangan nuklir Tiongkok setelah Mao. Masa kepemimpinan Mao dan Deng, yaitu 1949 – 1989, adalah era yang krusial bagi perkembangan nuklir Tiongkok. Pertahanan nuklir yang dibangun pada masa tersebut melepaskan Tiongkok dari kendali negara-negara lawan yang berkekuatan nuklir (Weidi, 2016). Meskipun saat itu militer tidak menjadi prioritas, tetapi para pemimpin Tiongkok kala itu mampu merumuskan konsep kebijakan nuklir yang komprehensif melalui strategi yang objektif dan persepsi keamanan nasional yang sesuai dengan kondisi Tiongkok.

Pada awalnya, para pemimpin Tiongkok percaya bahwa mereka tidak perlu menggunakan senjata nuklir untuk invasi karena sedikit gertakan balasan sudah

cukup untuk membuat lawan takut. Mao Zedong dan Deng Xiaoping sama-sama beranggapan jika Tiongkok mampu membangun senjata nuklir, maka kecil kemungkinan perang nuklir akan terjadi. Mereka juga bertekad hanya menggunakan senjata nuklir untuk pertahanan diri, sedangkan perlawanan tetap menggunakan senjata konvensional. Anggapan ini mencerminkan bahwa Tiongkok yakin lawannya tidak akan meluncurkan nuklir mereka.

Senjata nuklir adalah perlengkapan yang wajib bagi Tiongkok. Jika tidak memilikinya, ini akan menjadi celah bagi negara lawan untuk mengganggu keamanan nasional (Weidi, 2016). Meskipun demikian, pemimpin Tiongkok seperti Mao dan Deng tetap tidak berpikir untuk menggunakannya karena bagi mereka memiliki sejumlah kecil senjata nuklir sudah cukup untuk membuat lawan enggan mengganggu negaranya. Saat itu mereka berpikir bahwa keputusan tersebut adalah rasional karena Tiongkok masih belum mampu untuk membangun gudang senjata dengan hulu ledak nuklir yang kualitasnya sebanding dengan negara lawan. Keterbatasan anggaran berpotensi membuat Tiongkok bangkrut apabila memaksakan diri untuk ikut serta dalam perlombaan nuklir.

Prinsip dan sikap pemerintah Tiongkok yang tidak memprioritaskan senjata nuklir menjadikannya unik dibandingkan dengan negara bersenjata nuklir lainnya, terutama dengan NWS yang juga menerapkan kebijakan *No First Use* dengan mengecualikan penggunaan untuk kondisi tertentu. Pada perkembangannya, para pemimpin Tiongkok tetap konsisten dalam menerapkan kebijakan *No First Use*. Sejak peluncuran hulu ledak nuklir pertamanya, persenjataan nuklir Tiongkok tidak menunjukkan perkembangan signifikan. Tiongkok diketahui hanya memiliki hulu ledak berskala kecil yang tidak akan membahayakan lawannya yang dilengkapi senjata nuklir kapasitas besar. Fakta ini meyakinkan berbagai pihak serta para lawan politiknya bahwa Tiongkok konsisten dalam *No First Use*-nya yang tanpa syarat.

Namun, saat ini banyak pihak yang meragukan komitmen Tiongkok karena Tiongkok nyatanya terus meningkatkan kapabilitas persenjataannya, termasuk nuklir. Saat ini kapabilitas pertahanan militer persenjataan nuklir Tiongkok tengah bertumbuh pesat, yang mana hal tersebut belum pernah terjadi sepanjang masa

perkembangan nuklir Cina. Pertumbuhan ini tidak lepas dari peran presiden Xi Jinping yang telah memimpin Republik Rakyat Tiongkok sejak 2012 hingga saat ini. Di awal kenaikan jabatannya, Xi menyampaikan pada sebuah pidato bahwa ia bertekad untuk mendorong pengembangan sosialisme dengan karakteristik khas bangsa Tiongkok di era baru atau “*Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era*” serta berjuang untuk mencapai impian Tiongkok dalam membangun dan mencapai kepentingan nasional negaranya dengan melakukan peremajaan besar bangsa Tiongkok atau konsep *the great rejuvenation of the Chinese nation* (中华民族伟大复兴 atau *Zhōnghuá Mínzú Wěidà Fùxīng*) (BBC, 2013). Impian bangsa Tiongkok tersebut disebut sebagai *Chinese Dream* (*Zhongguo Meng*) oleh Xi.

Untuk mewujudkan *Chinese Dream*, Xi melanjutkan misinya dengan konsep keamanan nasional yang komprehensif atau *comprehensive national security* (总体国家安全 atau *Zǒngtǐ Guójiā Ānquán*), konsep turunan yang mengokohkan fondasi konsep besar sebelumnya, yaitu *the great rejuvenation of the Chinese nation*. Dalam *comprehensive national security*, terdapat 16 jenis keamanan nasional dari bidang yang berbeda yang merupakan perluasan dari 3 bidang keamanan tradisional inti, yaitu keamanan politik, keamanan militer, dan keamanan teritorial, akibat berkembangnya ancaman global. Pada konsep tersebut, Xi bermaksud untuk menginkluskasikan berbagai potensi ancaman keamanan nasional yang dihadapi dalam pembangunan Tiongkok dibawah naungan kerangka kerja yang menyeluruh (Legarda, 2021).

Perubahan besar dalam kerangka besar keamanan nasional Tiongkok tersebut berkaitan dengan dinamika persaingan geopolitiknya dengan negara Barat, terutama Amerika Serikat. Ketegangan politik dan keamanan antara Tiongkok dengan Amerika Serikat beserta sekutunya memaksa Tiongkok untuk mengubah kebijakannya yang selama ini cenderung defensif. Modernisasi militer adalah salah satu upaya yang dianggap ampuh dalam menjaga kepentingan dan keamanan nasional Tiongkok. Diantara dinamika tersebut, perubahan kebijakan pertahanan

nasional Amerika Serikat adalah salah satu katalisator bagi perubahan strategi pertahanan Tiongkok saat ini.

Pada 18 Desember 2017, presiden Amerika Serikat saat itu, Donald Trump, mempublikasikan strategi pertahanan nasional atau *National Security Strategy* (NSS). *National Security Strategy* adalah dokumen yang diamanatkan oleh kongres Amerika Serikat yang menguraikan strategi mengenai kepentingan keamanan nasional, lingkungan keamanan global, tantangan dalam kepentingan Amerika Serikat, serta kebijakan dan sarana lainnya yang dapat mengamankan kepentingan tersebut. Dalam dokumen *National Security Strategy 2017* tertulis bahwa Tiongkok adalah salah satu “*revisionist power*” yang mengancam kekuatan dan kepentingan Amerika Serikat. Perubahan militer dan nuklir Tiongkok yang semakin asertif merupakan upaya untuk menggerus keamanan dan kesejahteraan Amerika Serikat dan berpotensi mengubah tatanan kekuatan kawasan (The White House, 2017). Pertumbuhan kapabilitas militer dan modernisasi armada yang terus dilakukan Tiongkok dianggap sebagai ancaman geopolitik karena menghambat aktivitas Amerika Serikat di Asia Pasifik, terutama Laut Cina Selatan.

Tiongkok memang tercatat sedang melakukan modernisasi dan meningkatkan kekuatan nuklirnya, meskipun tetap pada batasan yang menunjukkan konsistensi terhadap *No First Use* (Heginbotham & et al, 2017). Hal ini dilakukan tidak lepas dari upaya Tiongkok untuk beradaptasi dengan dinamika keamanan internasional. Perubahan postur pencegahan konvensional Tiongkok tersebut menunjukkan pertahanan nasional yang lebih terintegrasi dan dinamis untuk menghadapi perang asimetris. Dalam hal ini telah terjadi perubahan pada kekuatan nuklir Tiongkok yang memungkinkannya untuk menggunakan senjata nuklir skala regional, yang artinya sudah melampaui pencegahan minimum (*minimum deterrence*) Tiongkok (Johnson J. , 2017).

Pada 19 Oktober 2018 Amerika Serikat kembali merilis dokumen resmi lainnya, kali ini dikeluarkan oleh Pentagon, yaitu *National Defense Strategy* (NDS). *National Defense Strategy* adalah kerangka kerja turunan yang masih berpedoman pada dan merupakan implementasi dari *National Security Strategy* yang dikeluarkan oleh presiden. Tujuan *National Defense Strategy* adalah untuk

memetakan lingkungan strategis global, postur kekuatan, dan peran Amerika Serikat dalam keamanan global.

Terdapat dua poin utama yang menjadi fokus tujuan dalam *National Defense Strategy* 2018: (1) Mengembalikan keunggulan kompetitif Amerika Serikat dengan menghalangi saingan global dari Rusia dan Tiongkok dalam menantang kekuatan Amerika Serikat dan sekutunya; (2) Menjaga agar kedua negara pesaing tersebut tidak mengacaukan tatanan internasional saat ini. Menurut Pentagon, negaranya tengah dihadapkan pada tantangan lingkungan keamanan global yang kompleks yang berdampak munculnya tantangan baru serta perubahan karakter peperangan. Dokumen tersebut juga menyebut bahwa kebangkitan kedua negara *revisionist power* menandai kemunculan kembali kompetisi strategis (*reemergence of long-term, strategic competition*) dan hal ini menjadi tantangan utama Amerika Serikat.

Pentagon menyebut Tiongkok ingin mengubah tatanan dunia sesuai ideologinya yang otoriter. Persepsi ini berdasarkan Tiongkok yang beberapa tahun terakhir aktif memodernisasi militer, meningkatkan pengaruhnya, serta menjadi predator dalam bidang ekonomi untuk menguntungkan mereka. Kekuatan militer yang semakin modern dapat dimanfaatkan untuk menekan negara tetangganya sehingga Tiongkok dapat mengubah tatanan hegemoni kawasan Indo-Pasifik dalam jangka pendek dan menggantikan posisi Amerika Serikat ditingkat global dalam jangka panjang (U.S. Department of Defense, 2018). Untuk beradaptasi dengan perkembangan tantangan yang terjadi, Amerika Serikat mengubah prioritas strategi pertahanannya. Salah satunya adalah dengan meningkatkan upaya modernisasi kekuatan nuklir serta kemungkinan untuk melakukan perlawanan terhadap koersi lawan yang didasarkan pada ancaman penggunaan nuklir atau serangan non-nuklir strategis.

Pada 22 Juli 2019, Tiongkok memperbarui kebijakan pertahanannya. Pemerintah Tiongkok mengeluarkan Buku Putih pertahanan terbaru berjudul *China's National Defense in The New Era*, pembaruan dari kebijakan pertahanan nasional yang terakhir diperbarui pada 2015. Dokumen tersebut berisi *grand strategy* keamanan pertahanan berupa visi keamanan global dalam menghadapi era baru dimana Tiongkok mendefinisikan dirinya sebagai pendorong perdamaian dunia

(*world peace*). Selanjutnya, dalam dokumen tersebut Tiongkok juga menyatakan tujuannya untuk membangun garis batas yang jelas pada prinsip-prinsip utama kedaulatan, keamanan, dan kepentingan pembangunan (*sovereignty, security, and development interests*) yang hendak dicapai Tiongkok.

China's National Defense in The New Era merupakan tanggapan pemerintah Tiongkok atas reformasi prioritas utama kebijakan Amerika Serikat pada *National Security Strategy 2017* dan *National Defense Strategy 2018* yang menjadikan Tiongkok dan Rusia sebagai potensi ancaman dan konflik akibat persaingan hegemoni dan geopolitik. Disisi lain, momentum ini menjadi kesempatan bagi Tiongkok untuk memperbarui Buku Putih Pertahanannya menjadi lebih komprehensif dengan menyertakan misi dari konsep *the great rejuvenation of the Chinese nation* atau pembaruan besar bangsa Tiongkok. Pembaruan dalam aspek militer menggunakan pemikiran Xi Jinping tentang militer (*Xi Jinping thought on military*) (Lei, 2021). Hal ini merupakan salah satu kebijakan luar negeri yang hendak dicapai oleh Xi, yaitu impian untuk membangun militer Tiongkok yang lebih kuat atau *dream of building a powerful military* (强军梦 atau *qiang jun meng*) (Heike, 2017).

Dalam dokumen resminya, Tiongkok menyatakan bahwa angkatan bersenjata setia terhadap seruan kemanusiaan, aktif dalam memenuhi kewajiban internasional angkatan bersenjata negara besar, secara komprehensif mempromosikan kerja sama militer internasional untuk era baru, dan berjuang untuk dunia yang lebih baik dengan perdamaian abadi dan keamanan bersama di dalamnya. Pada Buku Putih tersebut, Tiongkok juga menyampaikan bahwa modernisasi militer adalah untuk kepentingan defensif (Cordesman, 2019). Tiongkok beranggapan bahwa negaranya memerlukan investasi besar pada modernisasi militer karena *People's Liberation Army* (PLA) mereka telah tertinggal selama ini dan kini dihadapkan tuntutan era yang penuh tantangan dan risiko akibat pesatnya kemajuan teknologi.

Tiongkok berupaya untuk menyesuaikan tuntutan zaman dengan kapabilitas pertahanan keamanan nasionalnya melalui Buku Putih Pertahanannya. Tiongkok menyertakan kebijakan pertahanan nasional yang berjudul *China's Defensive*

National Defense Policy in the New Era. Kebijakan tersebut merupakan pedoman strategis bagi instrumen dan komando pertahanan Tiongkok sekaligus sebagai implementasi turunan dari *grand strategy* yang tercantum dalam *China's National Defense in The New Era*.

China's Defensive National Defense Policy in the New Era berisi tujuan mendasar pertahanan nasional Tiongkok di era baru. Di dalamnya tertulis bahwa sosialisme Tiongkok adalah ideologi yang disertai pertimbangan perdamaian dan harmoni sebagai asas fundamental. Asas ini menentukan misi Tiongkok yang ingin mencapai kebijakan pertahanan nasional yang defensif dengan salah satu tujuan utamanya adalah mencegah dan mampu menahan serangan (Ministry of National Defense of the People's Republic of China).

Pada bagian petunjuk implementasi strategis bagi militer di era baru, Tiongkok menekankan bahwa negaranya tidak akan menyerang kecuali diserang dan melakukan penyerangan setelah diserang. Tiongkok juga menyatakan bahwa negaranya selalu berkomitmen terhadap *No First Use* di seluruh aspek, kondisi, dan situasi. Senjata nuklir bukan alat untuk mengancam negara lain serta tidak akan menyerang negara non-senjata nuklir yang berada di wilayah bebas senjata nuklir atau *Nuclear Weapon Free Zones* (NWFZs) tanpa syarat. Tiongkok juga menyatakan tidak terlibat dalam perlombaan senjata nuklir karena nuklir adalah bagian dari pertahanan diri agar negaranya dapat mencapai keamanan strategis nasional, yaitu menghalangi negara-negara lawan menggunakan atau mengancam untuk menggunakan senjata nuklir terhadap Tiongkok.

Publikasi *China's Defensive National Defense Policy in the New Era* merupakan salah satu perwujudan implementasi dari prinsip *No First Use* tanpa terkecuali Tiongkok. *China's Defensive National Defense Policy in the New Era* dalam *China's National Defense in the New Era* merupakan publikasi yang menunjukkan keseriusan komitmen Tiongkok dalam kebijakan pertahanan nasionalnya.

Tiongkok diketahui memiliki sekitar 290 hulu ledak yang dapat dikirim oleh 180-190 rudal darat, 48 rudal balistik berbasis laut, dan pembom (Talmadge, 2019). Jumlah ini tidak sebanding dengan Amerika Serikat yang dibekali kurang lebih

4.000 hulu ledak. Rudal laut Tiongkok juga diperkirakan tidak akan sanggup melawan rudal Amerika Serikat dan sangat rentan untuk dikalahkan. Meskipun demikian, Amerika Serikat tetap memandang progres senjata nuklir Tiongkok sebagai kemajuan yang mengancam superioritas militernya. Setidaknya, perkembangan senjata nuklir Tiongkok membuat jarak keunggulan pertahanan Amerika Serikat dibandingkan Tiongkok menipis dan hal ini mengharuskan mereka untuk semakin waspada.

Fakta ini memunculkan kekhawatiran dari berbagai pihak. Militer Tiongkok yang kapabilitasnya selama ini dianggap rendah dan bukan ancaman, kini sibuk berbenah diri menghadapi tantangan geopolitik. Perubahan sistem dunia menjadi multipolar dan kemajuan teknologi yang semakin cepat menimbulkan tantangan baru akibat ketidakpastian keamanan. Dampaknya, pada masa kepemimpinan Xi Jinping, Tiongkok harus mengubah strategi keamanannya, termasuk pada aspek persenjataan nuklir.

Tiongkok selama ini menerapkan prinsip *No First Use* yang tanpa syarat pada senjata nuklirnya. Berbeda dengan para pemimpin sebelumnya, pada masa pemerintahan Xi Jinping, Tiongkok terus memodernisasi persenjataan militernya untuk beradaptasi dengan politik global. Modernisasi tersebut justru menimbulkan keraguan pihak internasional terhadap komitmen prinsip *No First Use* Tiongkok pada masa pemerintahan Xi Jinping. Muncul pula dugaan lain mengenai kemungkinan Presiden Xi Jinping mengubah prinsip kebijakan *No First Use* yang tanpa terkecuali menjadi *No First Use* yang situasional.

Sejumlah penelitian terdahulu yang terkait dengan topik bahasan dalam tulisan ini digunakan untuk membedakan lingkup kajian penelitian. Pada topik mengenai keamanan senjata nuklir, Załęski (2019) berpendapat bahwa senjata nuklir tidak dapat mengurangi potensi konflik karena pemiliknya akan terus mengembangkannya. Asumsi ini berdasarkan bukti dari menurunnya konflik internasional seiring berkembangnya senjata nuklir, sehingga nuklir dianggap sebagai jaminan keamanan yang efektif. Terlepas dari manfaatnya, senjata nuklir tetap menjadi ancaman keamanan bagi seluruh negara. Hal ini, menurut Załęski, tidak lepas dari kecenderungan negara pemiliknya untuk terus memodernisasi

kapabilitas senjatanya, mereka akan tidak mungkin melakukan reduksi dalam kondisi geopolitik yang tidak dapat diprediksi seperti saat ini. Begitu pula yang dilakukan oleh Tiongkok yang terus meningkatkan gudang senjatanya.

Pernyataan dalam literatur ini bermanfaat untuk memperkaya referensi penulis dalam menguraikan argumen mengenai dampak positif dan negatif dari senjata nuklir. Senjata nuklir yang dapat menurunkan eskalasi konflik antar negara adidaya maupun konflik kawasan menunjukkan nuklir adalah alat penting dalam *deterrence*. Namun, *deterrence* tersebut diiringi oleh ancaman dari bahaya dari senjata nuklir akibat persebaran nuklir melalui proliferasi.

Argumen ini serupa dengan pandangan Purwanto (2011) yang menganggap kepemilikan senjata nuklir oleh para NWS menimbulkan instabilitas pada tatanan keamanan internasional. Dinamika perkembangan senjata nuklir telah menjadikan senjata nuklir sebagai sarana diplomasi. Meluasnya penggunaan senjata nuklir serta ancumannya juga berimplikasi pada meluasnya jumlah aktor, dari bilateral menjadi multilateral dan terlibatnya institusi internasional seperti *International Atomic Energy Agency* (IAEA). Tinjauan literatur ini menunjang referensi penulis dalam hal kaitannya dengan *deterrence* karena *deterrence* merupakan salah satu upaya *hard diplomacy*.

Menurut Dragišić & Ćurčić (2020), keberadaan negara-negara yang dilengkapi dengan senjata nuklir memberikan dampak ganda bagi kestabilan sistem internasional. Sejumlah pihak memandang di satu sisi, nuklir dapat menciptakan keseimbangan pada dunia internasional yang saat ini berada pada sistem multipolar. Pendapat ini disampaikan umumnya oleh para pemikir neorealisme yang disebut *nuclear optimism*. Mereka menganggap nuklir adalah komponen penting dalam menjaga perdamaian dengan memberikan efek perdamaian yang sama, yang moderat, serta harus diarahkan oleh kekuatan besar nuklir. Namun, di sisi lain, proliferasi memperluas persebaran nuklir yang dapat meningkatkan risiko pecahnya perang nuklir karena negara terkait sama-sama merasa memiliki kewajiban untuk saling membalas serangan menggunakan amunisi yang mereka miliki. Pendapat ini sebagian besar disampaikan oleh pemikir yang berorientasi liberal yang disebut

juga sebagai *nuclear pessimism* dalam kaitannya dengan keberadaan dan penyebaran senjata nuklir.

Senjata nuklir merupakan ancaman bagi keamanan internasional apabila melihat dari sudut pandang liberalis. Sedangkan penganut neorealis meyakini bahwa dalam kondisi internasional yang modern, nuklir adalah jaminan bagi keamanan sekaligus menstabilkan tatanan internasional. Dragišić & Čurčić menyimpulkan nuklir adalah ancaman dan kesempatan bagi keamanan, ancaman jika hal tersebut menyangkut kepemilikan dan kesempatan untuk membangun keseimbangan kekuatan pada sistem dunia yang multipolar. Manfaat penelitian ini sama seperti literatur sebelumnya yang membahas ancaman dari senjata nuklir. Namun, perbedaannya adalah tulisan ini memberikan analisa yang lebih luas dengan menyertakan sudut pandang dari akademisi liberalis dan neorealis.

Sebagai tawaran solusi bagi ancaman keamanan akibat senjata nuklir, Jacobs & Nagan (2012) memberikan sejumlah gagasan. Menurutnya Jacobs & Nagan, pendekatan yang sebaiknya dikaji lebih jauh terkait masalah ancaman keamanan akibat kepemilikan senjata nuklir antara lain dengan melibatkan kolaborasi organisasi masyarakat serta pemerintah untuk melakukan program pendidikan publik untuk menantang pemikiran dan gagasan mengenai senjata nuklir yang menghalangi langkah-langkah menuju perlucutan senjata nuklir. Perlu juga dilakukan langkah-langkah lanjutan untuk membentuk konsorsium internasional organisasi masyarakat sipil dan pemerintah untuk melakukan referendum global untuk penilaian yang kredibel tentang kehendak kemanusiaan mengenai legalitas senjata nuklir. Dalam tingkat internasional, negara-negara perlu juga untuk membentuk dewan lisensi penasihat internasional yang dapat mengatur pembentukan dan pengoperasian reaktor energi nuklir. Literatur ini bermanfaat untuk memberikan gagasan solusi atas kekhawatiran akademisi pada tulisan-tulisan sebelumnya terkait ancaman keamanan akibat senjata nuklir serta proliferasinya.

Topik penelitian selanjutnya yang penulis gunakan sebagai referensi berkaitan dengan prinsip *No First Use*. Tiongkok adalah negara pertama yang menerapkan prinsip *No First Use* melalui publikasi resmi. Prinsip *No First Use* atau *No First Use Pledge* bertujuan untuk meminimalkan potensi dari eskalasi

pertempuran yang berujung pada penggunaan senjata nuklir. Dengan menerapkan prinsip *No First Use*, sebuah negara setidaknya menyatakan bahwa mereka tidak akan menggunakan senjata nuklir sebagai alat penyerangan. Prinsip ini juga dianggap sebagai aturan tidak resmi mengenai ketentuan penggunaan senjata nuklir oleh para NWS.

Hingga kini, belum ada peraturan atau hukum internasional yang mewajibkan negara bersenjata nuklir ataupun negara NPT (*Non-Proliferation Treaty*) untuk mengadopsi prinsip *No First Use* dalam hukum nasionalnya. Dampaknya, tidak seluruh negara bersenjata nuklir menerapkan prinsip *No First Use*. Hanya Tiongkok yang menyatakan secara tegas bahwa negaranya tidak akan menggunakan nuklir untuk penyerangan. Padahal, dalam ulasan yang ditulis oleh Nugraha & et al (2020), *No First Use* adalah jalan bagi terciptanya perdamaian dunia karena dapat meredakan dampak masif akibat penggunaan senjata nuklir pada konflik yang terjadi diantara negara bersenjata nuklir. Nugraha et al melanjutkan, bahkan, komitmen *No First Use* dinilai mampu menahan para kekuatan nuklir untuk menyerang terlebih dahulu mengingat tidak akan ada yang bersedia untuk memulai serangan, akibatnya, tidak akan ada pula serangan balasan. Argumen ini memperkaya referensi penulis dalam mengetahui manfaat dan alasan mengapa negara bersenjata nuklir harus menerapkan prinsip *No First Use*.

Pendapat lain mengenai kebijakan *No First Use* diungkapkan oleh Fetter dan Wolfsthal (2018). Meskipun dapat menjadi kesempatan untuk mengurangi potensi eskalasi perang nuklir, pada kasus Amerika Serikat, Fetter & Wolfsthal berargumen bahwa kebijakan tersebut sama sekali tidak akan mengurangi upaya pencegahan serangan nuklir terhadap Amerika Serikat atau sekutu-sekutunya. Alasannya, senjata nuklir bukanlah pencegah yang efektif terhadap serangan non-nuklir atau konvensional. Pendapat yang ditawarkan Fetter & Wolfsthal tersebut adalah hasil pengamatannya ketika Amerika Serikat masih di bawah kepemimpinan Donald Trump yang enggan untuk mematuhi norma-norma terkait non-proliferasi nuklir. Menurut Fetter & Wolfsthal, meskipun tindakan tersebut merusak citra Amerika Serikat sebagai negara yang mendukung nonproliferasi nuklir, tetapi dampaknya dapat menjaga hubungan Amerika Serikat dengan sekutunya. Maka dari itu, Fetter & Wolfsthal menganggap tindakan alternatif yang dapat dilakukan Amerika Serikat

adalah dengan tidak sepenuhnya bergantung pada nuklir dan justru terus mencari cara lain untuk meningkatkan pencegahan terhadap ancaman serangan perang secara konvensional sehingga relasi kekuatan antara Amerika Serikat dengan sekutunya dapat terus terjaga.

Literatur ini membantu penulis dalam membandingkan penggunaan *No First Use* di Amerika Serikat dengan Tiongkok. Meskipun Amerika Serikat belum menerapkan *No First Use*, namun saran yang disampaikan dalam literatur ini dapat menjadi masukan dan argumen bagi nuklir Tiongkok yang dibahas dalam penelitian ini. Upaya Tiongkok yang memodernisasi militer konvensional serta nuklir adalah keputusan yang rasional untuk mencegah ancaman.

Pendapat berbeda disampaikan oleh Lanoszka & Leo Scherer (2018). Kondisi dunia internasional yang anarki, tanpa ada otoritas yang mengatur tindakan negara, menjadi kesempatan bagi negara-negara kuat untuk menjalankan norma sebatas kepentingan nasionalnya semata. Kebijakan *No First Use* pada praktiknya tidak dapat sepenuhnya efektif untuk mencegah penggunaan senjata nuklir karena sikap dari para pemimpin negaranya yang cenderung ambigu. Sikap ini justru menimbulkan pandangan baru, yaitu *Ambigouos First Use*, yang merupakan sikap abu-abu dari para NWS mengenai penggunaan nuklir. Ketidakpastian tindakan akan mengarah pada *security dilemma* yang kemudian dapat memicu serangan pertama (*first strike*) dari lawan atau *preemptive strike* karena merasa terancam. Lanoszka & Leo Scherer berpendapat, jika para pendukung pemikiran *No First Use* menilai ambiguitas tersebut membahayakan, maka hal yang sama berlaku pula pada kondisi ketika *No First Use* diberlakukan. Menurut Lanoszka & Leo Scherer, *No First Use* tidak memberikan dampak yang signifikan untuk mereduksi perang secara keseluruhan karena pada dasarnya negara besar, seperti Amerika Serikat, tetap dapat dan mampu untuk melakukan pertempuran besar tanpa harus mengerahkan senjata nuklirnya.

Argumen Lanoszka & Leo Scherer memberikan referensi yang unik bagi argumen penelitian ini. Kondisi yang digambarkan oleh Lanoszka & Leo Scherer serupa dengan situasi Tiongkok saat ini. Jika melihat dari sudut pandang kekhawatiran dari sejumlah pihak, saat ini Tiongkok dapat dikatakan dalam tahap

Ambigouos First Use karena pihaknya yang terus meningkatkan kapabilitas senjata nuklirnya.

Sedangkan penelitian terdahulu terkait senjata nuklir Tiongkok ditulis oleh Pan (2018). Menurut Pan, kepemilikan senjata nuklir oleh Tiongkok merupakan keunikan tersendiri karena keberadaannya yang berbeda dalam beberapa aspek dibandingkan dengan senjata nuklir anggota NWS lainnya. Tiongkok adalah satu-satunya anggota NWS yang memegang prinsip *No First Use*. Sejak peluncuran pertama senjata nuklirnya, Tiongkok menyatakan bahwa negaranya memiliki senjata nuklir untuk kepentingan pertahanan diri, tidak akan menyulut peperangan dengan negara bersenjata nuklir lainnya, dan tidak akan menyerang negara non-senjata nuklir. Senjata nuklir adalah bagian dari kepentingan nasional Tiongkok yang diperlukan untuk mencegah peperangan dan mencegah serangan senjata nuklir lawan. Dengan demikian, negara lawan akan berpikir ulang dalam menyerang karena lawan tahu bahwa senjata Tiongkok setidaknya sama dengan senjata mereka.

Selain itu, hal lain yang membedakan adalah diantara seluruh negara bersenjata nuklir di dunia, hanya Tiongkok yang mengondisikan *No First Use* tanpa kecuali kapan pun dan dibawah kondisi apapun. Prinsip *No First Use* yang tanpa syarat ini menunjukkan bahwa Tiongkok tidak menggunakan senjata nuklir pada kebijakan luar negerinya. Menurut Pan, senjata nuklir merupakan pilihan yang rasional dari para pemimpin terdahulu Tiongkok sebagai upaya *active defense* untuk mempertahankan keamanan nasional dari ancaman musuh yang kapabilitasnya lebih kuat. Ketegangan politik dan militer antara Tiongkok dan negara rivalnya, Amerika Serikat memunculkan kekhawatiran para ahli dari kedua pihak mengenai kemungkinan timbulnya eskalasi perang konvensional. Meskipun kemungkinan tetap ada, namun prinsip *No First Use* yang sampai saat ini teguh digunakan Tiongkok menunjukkan bahwa kemungkinan tersebut tidak sebesar kemungkinan perang negara bersenjata nuklir lainnya yang bersedia menggunakan misil mereka, seperti Rusia dan Pakistan. Literatur Pan bermanfaat sebagai rujukan bagi penulis dalam mengulas karakteristik dari kebijakan senjata nuklir di Tiongkok, terutama dalam hal penggunaan prinsip *No First Use*.

Dalam pandangan Talmadge (2017), kekuatan nuklir minimal Tiongkok yang dikendalikan secara terpusat yang disertai dengan komitmen *No First Use* tampaknya cukup untuk meyakinkan dunia. Tiongkok tidak mungkin melakukan serangan lebih dahulu (*preemptive strike*), penggunaan yang tidak sah (*unauthorized use*), peluncuran yang tidak disengaja berdasarkan peringatan yang salah, dan eskalasi nuklir yang disengaja untuk menemui *stalemate* pada serangan militer konvensional. Penyebabnya adalah Tiongkok sadar akan konsekuensi kerugian material dari perang dan adanya *mutual deterrence* pada hubungan strategis Amerika Serikat dan Tiongkok.

Pendapat lainnya, Talmadge menganggap kapabilitas senjata nuklir Tiongkok tergolong rendah dan rentan terhadap serangan Amerika Serikat. Kemampuan tersebut tidak akan sebanding dengan Amerika Serikat yang sudah teruji kualitasnya sejak Perang Dingin sehingga perang konvensional antara Tiongkok-Amerika Serikat tidak akan mengubah perimbangan kekuatan nuklir. Argumen Talmadge menjadi salah satu rujukan utama bagi penulis dalam menilai penggunaan *No First Use* oleh Tiongkok. Pendapat Talmadge mengenai konsistensi *No First Use* Tiongkok juga disertai dengan sejumlah bukti data yang memperkuat argumen bahwa *No First Use* Tiongkok tidak akan diperbarui.

Sejak awal pengembangan senjata nuklir, Tiongkok hingga kini terus meningkatkan kapasitas gudang senjatanya. Kristensen & Korda (2020) memaparkan hasil penelitiannya mengenai kekuatan nuklir Tiongkok. Kristensen & Korda mengatakan bahwa prediksi Amerika Serikat tentang nuklir Tiongkok selama ini tidak pernah akurat, yang terbaru adalah pada 2020 Amerika Serikat merilis laporan terkait sekitar 200 hulu ledak berkekuatan rendah telah diuji coba oleh Tiongkok atau jumlah yang lebih sedikit dibandingkan perkiraan mereka selama ini. Perlu diketahui bahwa Tiongkok terus aktif memodernisasi rudal balistik daratnya secara bertahap, namun komposisi senjata nuklirnya tetap lebih sedikit dibandingkan milik Amerika Serikat dan Rusia. Tiongkok juga diketahui meluncurkan kapal selam dan rudal balistik lautan. Hasil temuan Kristensen & Korda merupakan referensi yang mendukung argumen penulis mengenai kapabilitas nuklir Tiongkok yang tidak semenakutkan apa yang disampaikan

sejumlah pihak. Perbandingan data persenjataan ini dapat menunjang argumen yang akan penulis gunakan terkait konsistensi *No First Use* Tiongkok.

Penelitian-penelitian terdahulu yang telah dipaparkan diatas membantu penulis untuk mengelaborasi dan mengeksplorasi kembali hasil temuan penelitian sebelumnya. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, tulisan ini bertujuan untuk mengulas implementasi prinsip *No First Use* tanpa terkecuali Tiongkok pada pemerintahan Xi Jinping sepanjang 2017 – 2019. Untuk membuat penelitian ini menjadi spesifik, penelitian ini diberi judul “Implementasi Prinsip *No First Use* Pada Kebijakan Senjata Nuklir Tiongkok di Era Pemerintahan Xi Jinping 2017 – 2019” untuk memperjelas inti dari penelitian.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, implementasi *No First Use* tanpa terkecuali senjata nuklir Tiongkok pada masa Xi Jinping menghadapi sejumlah tantangan. Pihak internasional meragukan Tiongkok akan tetap berkomitmen untuk menerapkan *No First Use* tanpa terkecuali dalam kondisi kapabilitas militer yang terus ditingkatkan pada masa Xi Jinping. Diperlukan penelitian untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip *No First Use* Tiongkok pada pemerintahan Xi Jinping. Untuk membahas secara detail mengenai komitmen *No First Use* pada pemerintahan Xi Jinping tersebut, rumusan masalah yang akan dibahas penulis dalam tulisan ini yaitu, *bagaimana implementasi prinsip No First Use Tiongkok pada pemerintahan Xi Jinping tahun 2017 – 2019?*

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Praktis

Tujuan praktis dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip *No First Use* pada pemerintahan Xi Jinping. Dengan meneliti prinsip *No First Use* pada pemerintahan Xi Jinping, peneliti dan pembaca dapat mengetahui perbedaan implementasi prinsip *No First Use* dengan para pemimpin sebelumnya. Kajian tersebut diharapkan dapat membuat peneliti serta pembaca dapat memahami pengelolaan senjata nuklir

dan implementasi prinsip *No First Use* melalui sudut pandang pemerintah Tiongkok.

1.3.2 Tujuan Teoritis

Tujuan teoritis dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perspektif konsep keamanan militer, teori *deterrence*, dan konsep dilema keamanan (*security dilemma*) dapat menganalisa penerapan prinsip *No First Use* Tiongkok pada pemerintahan Xi Jinping. Konsep keamanan militer bertujuan untuk mengaji pemerintahan Xi Jinping yang menjadi objek yang terancam sehingga membangun pertahanan nuklir. Sedangkan konsep dilema keamanan akan digunakan untuk menganalisa sudut pandang Tiongkok mengenai kondisi persaingan militer dan politik yang sedang terjadi saat ini. Tiongkok di satu sisi dihadapkan pada ancaman Amerika Serikat dan sekutunya. Di sisi lain, secara geografi negara-negara tersebut bukan merupakan negara yang terletak di sekitar teritorial Tiongkok. Terdapat negara *Nuclear Weapon Free Zones* (NWFZs) yang tidak mengancam pertahanan Tiongkok dengan nuklir. Teori *deterrence* akan menganalisa bagaimana pemerintahan Xi Jinping mempersepsikan prinsip *No First Use* dan mengimplementasikannya berdasarkan biaya (*cost*) yang mereka pertimbangkan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat umumnya untuk menambah wawasan bagi penulis serta pembaca mengenai sudut pandang Tiongkok dalam mengelola senjata nuklir. Secara khusus, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para penstudi Hubungan Internasional yang tertarik terhadap kajian mengenai keamanan tradisional seputar senjata nuklir yang dikaji dengan konsep keamanan militer, konsep dilema keamanan, serta teori *deterrence* dengan objek penelitian pemerintah Tiongkok. Data dan analisa yang dipaparkan dalam penelitian ini diharapkan dapat memperkaya sumber data terkait topik keamanan tradisional, khususnya seputar persenjataan nuklir Tiongkok.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB 1 : Pendahuluan

Bagian Bab I digunakan sebagai pengantar terhadap permasalahan yang akan diteliti. Penulis memaparkan gambaran mengenai permasalahan yang ditemukan, penelitian terdahulu yang dijadikan referensi untuk membedakan penelitian lama dengan penelitian kali ini, serta latar belakang mengapa penelitian ini perlu dilakukan. Dalam bab ini terdapat beberapa poin yakni latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian secara praktis dan teoritis, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB 2 : Tinjauan Pustaka

Pada tinjauan pustaka penulis akan memaparkan kerangka teori dan konsep yang digunakan sebagai pisau analisa penelitian, yaitu konsep keamanan militer, konsep dilema keamanan, serta teori *deterrence*. Terdapat juga gambaran pemikiran yang berisi alur berpikir penelitian dari rumusan masalah yang berguna untuk memetakan pemikiran selama riset dilakukan sehingga dapat menghasilkan jawaban dan temuan penelitian.

BAB 3 : Metodologi Penelitian

Pada bab ini penulis akan menjelaskan metode penelitian yang akan digunakan, antara lain objek penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data, teknik analisis data, serta tabel rencana waktu yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB 4 : Perkembangan Senjata Nuklir Tiongkok

Pada Bab 4 penulis akan menjabarkan perkembangan senjata nuklir secara umum dan dikerucutkan menjadi perkembangan senjata nuklir di Tiongkok secara khusus. Subbab dalam bab ini terdiri atas senjata nuklir secara umum, gambaran umum mengenai keamanan Tiongkok dan kebijakan senjata nuklirnya, kapasitas dan kapabilitas nuklir di Tiongkok mulai dari nuklir untuk perdamaian hingga untuk pertahanan, serta kebijakan senjata nuklir dan

implementasi prinsip *No First Use* di Tiongkok pada masa pemerintahan Mao Zedong dan Deng Xiaoping.

BAB 5 : Dinamika Kebijakan Senjata Nuklir Tiongkok

Dalam bab 5 penulis memaparkan hasil yang ditemukan terkait data mengenai bagaimana implementasi prinsip *No First Use* pemerintah Tiongkok pada masa pemerintahan Xi Jinping sepanjang 2017 – 2019. Hasil penelitian berupa pemaparan analisa data berdasarkan teori yang digunakan, yaitu konsep keamanan militer, teori *deterrence*, dan konsep dilema keamanan agar dapat menjawab rumusan masalah yang dipaparkan pada bab pendahuluan.

BAB 6 : Kesimpulan dan Saran

Bab 6 berisi penutup dari rangkaian penelitian yang terdiri atas kesimpulan dan saran berupa rekomendasi atau tanggapan penulis terkait hasil yang ditemukan dalam penelitian ini. Poin kesimpulan berupa argumen akhir setelah melakukan analisa dan pembahasan dalam menjawab permasalahan. Kesimpulan merupakan penyederhanaan dari pembahasan dengan mempertimbangkan kerangka berpikir dan teori yang digunakan. Sedangkan dalam poin saran terdapat usulan dan pendapat peneliti terkait upaya pemecahan masalah penelitian agar dapat dilaksanakan pada dunia praktis ataupun teoritis berupa penelitian lanjutan untuk pengembangan ilmu pengetahuan secara akademis. Bagian saran dapat berupa saran praktis ataupun saran teoritis.